

Judul : IPU Sepakat Tingkatkan Perlindungan HAM
Tanggal : Kamis, 05 Maret 2015
Surat Kabar : Suara Karya
Halaman : 3

Serangan pada KJRI Diminta Diusut

■ Dessy Suciati Saputri,
Halimatus Sa'diyah

**Indonesia-Australia harus
bijak soal eksekusi terpidana
mati narkoba.**

JAKARTA — Pemerintah Indonesia meminta Australia mengusut tuntas kasus serangan terhadap KJRI di Sydney. Pada Selasa (3/3) pagi, cairan serupa darah berceceran di pintu gerbang KJRI. Berdasarkan rekaman CCTV, seorang perempuan melakukan aksi serangan ini.

Diyakini, aksi tersebut dilakukan bersamaan dengan semakin dekatnya eksekusi mati dua warga Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Kepala Badan Intelijen Negara BIN Marciano Norman mengatakan, Indonesia mendesak Australia melakukan pengusutan secara tuntas.

Selain itu, Indonesia meminta bantuan pengamanan di KJRI dari

kepolisian setempat. "Kami meminta dinas intelijen dan Kepolisian Australia mencari pelaku dan memberikan dukungan keamanan bagi KJRI," kata Marciano, Rabu (4/3).

Pemerintah, kata Marciano, akan terus berkoordinasi dengan Kepolisian Australia yang sedang bekerja mengungkap kasus teror itu. Dia juga menyebutkan, Presiden Joko Widodo meminta agar perwakilan Indonesia di Australia memperoleh jaminan keamanan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, teror itu merupakan bentuk ketidakpuasan terkait putusan eksekusi mati. "Jadi sebenarnya itu tanda ketidakpuasan saja. Itu biasa saja," kata Kalla di Kantor Wapres, kemarin.

Menurut dia, bentuk protes seperti itu sering terjadi di negara mana saja. Ia pun mencontohkan saat Malaysia akan menghukum mati warga Indonesia, masyarakat meluapkan rasa ketidakpuasannya dengan melakukan pelemparan.

Kalla menyerahkan sepenuhnya pengamanan KJRI di Sydney dan

seluruh perwakilan Indonesia di Australia kepada aparat keamanan setempat. Menurut dia, meski ada insiden di KJRI, pelaksanaan hukuman mati tetap berjalan.

Di sisi lain, Australia tetap menekan Pemerintah Indonesia untuk melindungi warga negaranya. Terakhir, ungkap Kalla, Menlu Australia Julie Bishop melakukan pembicaraan dengan Menlu Retno Marsudi mengenai putusan eksekusi mati.

Menlu Indonesia menjelaskan bahwa ini posisinya yang memutuskan bukanlah Presiden, melainkan pengadilan. Karena, penetapan hukuman berada di ranah hukum. Selain Australia, kata Kalla, negara lainnya juga menempuh lobi yang sama.

Mereka meminta ada pengampunan dari Indonesia atas warganya yang masuk dalam daftar eksekusi. Terkait dampak dari eksekusi mati, Wapres mengatakan, Pemerintah Australia tak berencana menarik dubesnya dari Indonesia.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Tedjo Edy Purdijatno